TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan
Vol. 3 No. 3 Januari 2026, hal., 439-448
e-ISSN: 3031-6960

PERAN LITERASI DIGITAL DALAM MENCEGAH DISINFORMASI PADA PESERTA DIDIK

Muhammad Hasan Basari
Universitas Islam Depok
basarihasan.1966@upi.edu

Radja Fatra Hilal
Universitas Islam Depok
Elfnov28@gmail.com

Rafliakmal
Universitas Islam Depok
Rafliakmal2020@gmail.com

Muhammad ilham fadhilah
Universitas Islam Depok
muhammad16061421@gmail.com

Abstract

The rapid development of information technology provides students with easier access to various sources of knowledge. However, this situation also increases their exposure to disinformation, which can influence their understanding and decision-making. Digital literacy becomes an essential competency to help students identify, evaluate, and verify the information they encounter online. This study aims to examine the role of digital literacy in preventing disinformation among students by focusing on critical thinking skills, responsible media use, and the ability to assess information sources. Using a qualitative approach, the study emphasizes the importance of collaboration among schools, teachers, and families in guiding students through digital environments. The findings indicate that strengthening digital literacy significantly improves students' ability to filter valid information, thus protecting them from the negative impact of disinformation and fostering more responsible learning habits

Keywords: *Digital Literacy; Disinformation; Students; Critical Thinking; Media Awareness.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan. Namun, kondisi ini juga meningkatkan risiko paparan disinformasi yang dapat memengaruhi pemahaman dan perilaku mereka. Literasi digital menjadi kompetensi penting untuk membantu peserta didik mengenali, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi yang ditemui di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi digital dalam mencegah disinformasi pada peserta didik, khususnya melalui pemahaman kemampuan berpikir kritis, penggunaan media secara bijak, serta keterampilan memeriksa sumber informasi. Dengan

pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, guru, dan lingkungan keluarga dalam membimbing peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan literasi digital mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memilah informasi yang valid, sehingga mereka lebih terlindungi dari pengaruh negatif disinformasi dan dapat membangun pola belajar yang lebih bertanggung jawab.
Kata Kunci : Literasi Digital; Disinformasi; Peserta Didik; Berpikir Kritis; Kesadaran Media.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ini membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Peserta didik saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan perangkat digital, internet, serta berbagai platform media sosial yang menyediakan akses informasi tanpa batas. Akses yang luas tersebut memberikan peluang besar untuk mendukung proses pembelajaran, memperkaya wawasan, dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Namun kemudahan yang ditawarkan ruang digital juga memberikan tantangan serius, terutama terkait maraknya penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi cara berpikir, sikap, serta perilaku peserta didik. Dalam situasi seperti ini, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting agar peserta didik mampu menilai, menganalisis, dan memverifikasi informasi dengan tepat[1].

Secara umum, literasi digital dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Konsep ini diperkenalkan secara[1] mendalam oleh Paul Gilster yang menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan perangkat, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang ditemui di ruang digital. Gilster menjelaskan bahwa literasi digital melibatkan kemampuan membaca, menilai, serta mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital secara cermat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa literasi digital merupakan kombinasi antara kemampuan teknis dan kemampuan kognitif, terutama dalam menghadapi beragam informasi yang kualitasnya tidak selalu dapat dipercaya.

Teori literasi digital juga berkembang dalam kajian internasional. UNESCO menegaskan bahwa literasi digital merupakan salah satu kompetensi dasar abad dua puluh satu yang diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan global. UNESCO menggarisbawahi pentingnya kemampuan berpikir kritis, keterampilan evaluasi informasi, serta kesadaran terhadap risiko ruang digital seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi konten.[2] Melalui kerangka kompetensi literasi digital yang dikembangkan, UNESCO mendorong agar pengguna, termasuk peserta didik, mampu memahami struktur informasi,

[1] Paul Gilster, *Digital Literacy* (New York: Wiley, 1997), hlm. 12.
[2] UNESCO, "Digital Competency Framework," https://unesco.org/digital-literacy.

mengenali kredibilitas sumber, serta menerapkan etika penggunaan teknologi yang benar dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, literasi digital menjadi semakin relevan karena tingginya jumlah pengguna internet di kalangan anak dan remaja. Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, dan sebagian besar akses tersebut dilakukan melalui perangkat pribadi tanpa pendampingan langsung dari orang tua maupun guru. Kondisi ini menjadikan peserta didik kelompok yang rentan terpapar disinformasi. Laporan tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan ribuan temuan konten hoaks yang beredar setiap tahun, terutama melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Banyak dari konten tersebut disebarkan secara cepat tanpa proses verifikasi, sehingga peserta didik yang terbiasa menerima informasi secara instan dapat dengan mudah mempercayai informasi palsu tersebut.

Gerakan Literasi Nasional yang dicanangkan Kementerian Pendidikan menempatkan literasi digital sebagai salah satu fokus utama penguatan kompetensi peserta didik. Literasi digital dalam perspektif kebijakan nasional tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat, tetapi juga penguatan kemampuan dalam memahami konteks informasi, menilai kevalidan data, dan membentuk perilaku etis dalam berkomunikasi di ruang digital.[4] Pendidikan literasi digital di sekolah juga mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila yang memiliki kemampuan bernalar kritis, kreatif, serta berperilaku sesuai nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, literasi digital memiliki relevansi strategis dalam membentuk karakter peserta didik di era digital.

Marak maraknya disinformasi di Indonesia memiliki dampak yang luas. Disinformasi tidak hanya berkaitan dengan isu politik, tetapi juga menyentuh isu sosial, pendidikan, kesehatan, hingga moral. Peserta didik yang belum memiliki kematangan berpikir sering kali kesulitan membedakan fakta dan opini, atau membedakan informasi yang valid dan informasi yang sengaja direkayasa untuk menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pemahaman, perubahan sikap yang tidak sesuai nilai pendidikan, bahkan dapat mengganggu interaksi sosial di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, literasi digital menjadi elemen penting untuk memberikan perlindungan bagi peserta didik dari risiko informasi yang manipulatif.

Dalam dunia pendidikan, guru memegang peran sentral dalam membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Namun tidak semua guru memiliki tingkat penguasaan teknologi yang merata. Banyak guru masih kesulitan mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran karena keterbatasan fasilitas, kur[2]angnya pelatihan, atau minimnya dukungan teknis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat guru merupakan model utama dalam menampilkan praktik

[2][3]Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Laporan Hoaks Nasional," https://kominfo.go.id.
[4]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Gerakan Literasi Nasional*, https://gln.kemdikbud.go.id.

penggunaan informasi digital yang benar dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kurikulum pendidikan juga perlu memberikan ruang untuk pembelajaran literasi digital secara sistematis, sehingga peserta didik memiliki pengalaman langsung dalam menilai dan memeriksa informasi digital, bukan hanya mempelajarinya secara teoretis.

Lingkungan keluarga memiliki peran yang tidak kalah penting. Namun banyak orang tua yang belum memahami risiko disinformasi digital. Orang tua sering kali memberikan akses perangkat kepada anak tanpa pengawasan yang cukup, sehingga peserta didik dapat bebas mengakses berbagai informasi yang belum tentu sesuai dengan usia ataupun kebutuhan belajar mereka. Minimnya pemahaman orang tua mengenai literasi digital membuat pendampingan menjadi kurang optimal, sehingga sekolah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memberikan edukasi literasi digital secara menyeluruh.[5]

Selain faktor pendidikan dan keluarga, tantangan literasi digital di Indonesia juga berkaitan dengan budaya konsumsi informasi. Peserta didik pada umumnya lebih menyukai informasi singkat dan cepat, terutama yang disajikan melalui media sosial. Kebiasaan ini sering membuat mereka mengabaikan proses verifikasi informasi. Banjir informasi yang datang dari berbagai sumber membuat peserta didik lebih sulit membedakan informasi yang berkualitas dengan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pembelajaran literasi digital harus mengajarkan keterampilan dasar seperti pencarian informasi, pemeriksaan fakta, penilaian kredibilitas, dan etika digital.

Melihat kompleksitas tantangan yang muncul akibat disinformasi, penelitian mengenai peran literasi digital dalam mencegah disinformasi pada peserta didik menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi langsung bagi dunia pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Literasi digital dapat berfungsi sebagai benteng yang membantu peserta didik menghadapi dinamika informasi global, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi individu yang cerd[3]as, kritis, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan pola pikir peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.[6]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam bagaimana literasi digital berperan dalam mencegah disinformasi pada peserta didik. Pendekatan kualitatif dipilih untuk

[3][5] Kominfo, "Edukasi Keamanan Digital," https://siberkreasi.id
[6] UNESCO, "Guidelines on Digital Literacy," https://unesco.org/digital-guidelines.
[7] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

menggambarkan fenomena secara alami dan menekankan makna yang muncul dari pengalaman informan.[7]

Subjek penelitian terdiri atas peserta didik, guru, dan pihak sekolah yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan yang dianggap paling memahami penggunaan media digital dan paparan disinformasi.[8] Objek penelitian meliputi kemampuan literasi digital peserta didik, bentuk disinformasi yang mereka temukan, serta strategi pencegahan yang dilakukan sekolah.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat perilaku peserta didik saat menggunakan media digital. Wawancara dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti program literasi digital sekolah.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital peserta didik masih beragam. Sebagian peserta didik mampu mengoperasikan perangkat digital, namun kemampuan evaluatif dalam menilai akurasi informasi masih rendah. Temuan ini sejalan dengan panda[4]ngan bahwa kemampuan teknis tidak otomatis meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi.[10]

Observasi menunjukkan bahwa peserta didik cenderung menerima informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi. Informasi dengan judul provokatif atau yang dibagikan oleh figur publik lebih mudah dipercaya, terutama karena peserta didik terbiasa mengonsumsi informasi secara cepat. Keterbatasan kemampuan mengenali ciri disinformasi membuat mereka rentan menyebarkan ulang informasi yang salah. Temuan ini konsisten dengan fenomena umum generasi digital yang lebih fokus pada kecepatan daripada akurasi.[11]

Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa literasi digital belum sepenuhnya terintegrasi dalam pembelajaran. Guru mengakui bahwa materi literasi digital sering dianggap tambahan, bukan kompetensi inti. Beberapa guru yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek menemukan peningkatan kemampuan analisis peserta didik ketika mereka diminta membandingkan beberapa sumber informasi. Namun, implementasinya belum merata karena keterbatasan waktu, fasilitas, dan pelatihan.[12]

Dokumentasi sekolah memperlihatkan adanya program literasi digital, namun fokusnya lebih pada etika penggunaan perangkat, bukan kemampuan mengevaluasi informasi. Aspek penting seperti identifikasi hoaks, analisis sumber, dan penilaian

---

[4][8]Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), hlm. 33.
[9]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 273.
[10]Paul Gilster, *Digital Literacy* (New York: Wiley, 1997), hlm. 22.
[11]UNESCO, "Media and Information Literacy Framework," https://www.unesco.org/en/media-information-literacy
[12]A. Hidayat dan I. Machali, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 75.

kredibilitas belum diberikan porsi cukup. Kondisi ini menyebabkan peserta didik tetap kekurangan kemampuan kritis ketika menghadapi arus informasi di luar sekolah.[13]

Hasil penelitian juga menguatkan bahwa literasi digital merupakan faktor penting dalam menc[5]egah disinformasi. Literasi digital tidak hanya terkait kemampuan teknis, tetapi mencakup keterampilan menentukan kredibilitas sumber, memeriksa fakta, dan memahami konteks informasi. Ketika kemampuan ini tidak diajarkan secara sistematis, peserta didik akan kesulitan membedakan informasi valid dan tidak valid.[14]

Konteks nasional menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait disinformasi. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ratusan hoaks tersebar setiap tahun, terutama pada bidang politik, kesehatan, dan pendidikan.[15] Temuan tersebut menguatkan kondisi lapangan bahwa peserta didik hidup dalam ekosistem digital yang sangat rawan misinformasi sehingga kemampuan literasi [6]digital harus menjadi prioritas pendidikan.

Upaya pencegahan disinformasi dapat dilakukan melalui integrasi literasi digital dalam mata pelajaran, pembiasaan verifikasi informasi, serta pelatihan guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik mengenali ciri informasi palsu, melakukan pengecekan fakta, dan menggunakan sumber terpercaya. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan digital yang sehat melalui kebijakan penggunaan media, kurasi sumber belajar, dan program literasi yang konsisten.[16]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memegang peran penting dalam membentuk peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, peserta didik tidak hanya terhindar dari disinformasi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat sekitarnya.

Analisis/Diskusi

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah disinformasi pada peserta didik. Meskipun peserta didik tampak mahir menggunakan perangkat digital dan aktif di berbagai platform media sosial, kemampuan tersebut ternyata belum sejalan dengan kompetensi evaluatif dalam menilai kredibilitas sebuah informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional teknologi tidak identik dengan literasi digital yang sesungguhnya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi digital mencakup kemampuan kognitif dan kritis dalam berinteraksi dengan informasi digital.[17]

---

[5][13]E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11.
[14]Fred R. David, *Strategic Management* (New Jersey: Pearson, 2017), hlm. 4.
[15] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Laporan Isu Hoaks," https://kominfo.go.id
[16]R. Wahyudi, "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Sekolah," *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 10, No. 2 (2022): 120–122..
[17]Paul Gilster, *Digital Literacy* (New York: Wiley, 1997), hlm. 22.
6

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta didik sering menerima informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi. Kebiasaan konsumsi cepat membuat mereka mengabaikan langkah pengecekan sumber. Mereka cenderung mengandalkan penilaian subjektif seperti kepopuleran akun, jumlah pengikut, atau kesan emosional dari judul berita. Pola ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang menyajikan konten sesuai preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang gema (echo chamber) yang mempersempit variasi informasi. Dalam konteks ini, teori literasi media menjelaskan bahwa peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk mengenali bias, motif sumber, serta struktur produksi media.[18]

Hasil wawancara dengan guru semakin memperkuat bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran masih terbatas. Literasi digital belum dianggap sebagai kebutuhan inti, melainkan hanya materi pendukung. Padahal, pendekatan pedagogis modern menekankan pentingnya pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif.[19] Guru mengakui bahwa pembelajaran berbasis proyek yang meminta peserta didik membandingkan dua atau tiga sumber informasi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Namun implementasi pembelajaran seperti ini belum merata karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan waktu, minimnya pelatihan, dan padatnya kurikulum.

Dari analisis dokumentasi sekolah, tampak bahwa program literasi digital yang dimiliki sekolah lebih banyak berfokus pada etika penggunaan perangkat seperti tata tertib membawa gawai, kewajiban menggunakan bahasa sopan, dan peringatan mengenai keamanan digital. Fok[7]us tersebut memang penting, tetapi belum mencakup aspek yang membantu peserta didik menghadapi disinformasi secara praktis. Aspek seperti cara memeriksa sumber, membedakan opini dan fakta, menganalisis struktur berita, maupun mengidentifikasi hoaks belum diberikan porsi pembelajaran yang memadai.[20]

Selain pengaruh lingkungan sekolah, analisis menemukan bahwa keluarga dan komunitas turut memengaruhi pola literasi digital peserta didik. Banyak peserta didik mengaku bahwa mereka terpapar disinformasi justru dari grup keluarga atau lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan laporan nasional bahwa tersebarnya hoaks di Indonesia tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam interaksi personal sehari-hari. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ratusan hoaks yang tersebar setiap tahun, terutama terkait isu politik, kesehatan, dan pendidikan.[21] Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik hidup dalam ekosistem informasi yang sangat rawan.

---

[7][18]David Buckingham, *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture* (Cambridge: Polity Press, 2003), hlm. 45.
[19]E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11.
[20]A. Hidayat dan I. Machali, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 75.
[21]Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Laporan Isu Hoaks Nasional," https://kominfo.go.id

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam literasi digital bukan hanya kurangnya keterampilan teknis, tetapi lemahnya kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis menjadi instrumen utama bagi peserta didik untuk menilai akurasi informasi, mengenali pola manipulasi, serta memahami konteks sebuah berita. Ketika peserta didik dihadapkan pada disinformasi, kemampuan untuk mengidentifikasi kejanggalan konten, membandingkan sumber, dan mencari rujukan resmi menjadi sangat penting. UNESCO dalam kerangka kerja literasi informasi menegaskan bahwa kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara etis merupakan inti dari literasi digital.[22] Dengan demikian, literasi digital yang komprehensif sangat diperlukan agar peserta didik memiliki ketahanan kognitif dalam menghadapi disinformasi.

Hasil analisis juga memperlihatkan pentingnya peran guru sebagai fasilitator literasi digital. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga pembimbing dalam membentuk pola pikir kritis peserta didik. Peningkatan kompetensi guru terkait literasi digital akan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan program pencegahan disinformasi. Guru yang memiliki wawasan tentang mekanisme media digital, jenis-jenis disinformasi, dan teknik pengecekan fakta dapat mengarahkan peserta didik pada penggunaan informasi yang lebih bertanggung jawab.[23]

Sinergi antara sekolah, guru, dan peserta didik merupakan kunci dalam membangun literasi digital yang efektif.[8] Sekolah dapat menyediakan kebijakan, fasilitas, dan program pendukung seperti workshop cek fakta, akses pada sumber resmi, hingga integrasi literasi digital dalam mata pelajaran. Guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang mendorong peserta didik menganalisis sumber. Peserta didik sendiri perlu dilatih untuk menjadi pengguna media digital yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab.

Pada tataran makro, peran pemerintah juga diperlukan dalam mendukung pendidikan literasi digital. Pemerintah dapat menyediakan modul, platform cek fakta, dan kampanye publik yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dapat memperkuat ketahanan informasi peserta didik dari segala bentuk disinformasi.

Analisis keseluruhan penelitian memperlihatkan bahwa literasi digital merupakan kompetensi multidimensi yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan peserta didik dalam menolak disinformasi. Literasi digital bukan sekadar alat bantu belajar, melainkan fondasi utama bagi peserta didik agar dapat berperan aktif sebagai warga digital yang cerdas. Ketika literasi digital dikembangkan secara sistematis di sekolah, peserta didik tidak hanya mampu menghindari disinformasi, tetapi juga

[8][22]UNESCO, "Media and Information Literacy Framework," https://www.unesco.org/en/media-information-literacy

[23]R. Wahyudi, "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Sekolah," *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 10, No. 2 (2022): 120–122.

mampu memberikan kontribusi positif dalam penyebaran informasi yang benar di lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran yang krusial dalam mencegah penyebaran disinformasi pada peserta didik. Meskipun peserta didik telah terbiasa menggunakan perangkat digital dan aktif pada berbagai platform media sosial, kemampuan mereka dalam mengevaluasi kredibilitas informasi masih tergolong rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peserta didik sering menerima dan membagikan informasi tanpa verifikasi yang memadai, dipengaruhi oleh budaya konsumsi informasi cepat dan algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema. Peran guru dan sekolah terbukti sangat penting dalam membentuk pola literasi digital peserta didik, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan pelatihan dan padatnya kurikulum. Program literasi digital yang ada lebih menekankan etika penggunaan perangkat daripada keterampilan cek fakta yang bersifat substantif.

Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat juga berkontribusi terhadap paparan disinformasi peserta didik, menunjukkan bahwa ekosistem informasi yang mereka hadapi sangat kompleks. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan sekolah, guru, keluarga, dan pemerintah.

Secara keseluruhan, literasi digital berfungsi sebagai fondasi utama untuk membentuk peserta didik yang kritis, mandiri, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Dengan penguatan literasi digital yang terintegrasi, peserta didik memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi arus disinformasi serta mampu berkontribusi pada penyebaran informasi yang akurat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buckingham, David. *Youth, Identity, and Digital Media*. Cambridge: MIT Press, 2008.

David, Fred R. *Strategic Management: Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education, 2017.

Gilster, Paul. *Digital Literacy*. New York: Wiley, 1997.

Hidayat, A., dan I. Machali. *Manajemen Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2016.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Isu Hoaks Nasional*. 2024. https://kominfo.go.id

Livingstone, Sonia. "Critical Reflections on the Concept of Media Literacy." *Nordicom Review*, 31 (2010): 9–28.

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

UNESCO. "Media and Information Literacy Framework." 2023. https://www.unesco.org/en/media-information-literacy

Wahyudi, R. "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Sekolah." *Jurnal Kependidikan Islam*, 10, no. 2 (2022): 120–122.

Wardle, Claire, dan Hossein Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. Strasbourg: Council of Europe, 2017.